

STATISTIK KEUANGAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2015-2016



STATISTIK KEUANGAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2015-2016



**STATISTIK KEUANGAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2015 -2016**

ISBN : 978-602-139-246-1
Nomor Publikasi : 34540.1702
Katalog : 7203007.34

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : x + 58 halaman

Naskah :
Bidang Statistik Distribusi

Penyunting :
Bidang Statistik Distribusi

Gambar Kulit :
Bidang Statistik Distribusi

Diterbitkan oleh :
© BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dicetak oleh :
CV. Magna Raharja Tama (MAHATA)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

**STATISTIK KEUANGAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2015 - 2016**

Pengarah :

Johanes De Britto Priyono

Penanggung Jawab Teknis:

Arjuliwondo, S.Si

Editor :

Chatarina Budi Anggarini, S.ST, M.M

Penulis :

Sugiarti, S.Si

Pengolah Data :

Triana Setyaningsih, SE

Desain/Layout :

Sugiarti, S.Si

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2015-2016 merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya yang secara teratur telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini menyajikan data mengenai Realisasi APBD 2015 dan APBD 2016 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data mengenai keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk perbaikan publikasi di masa mendatang, tanggapan dan saran-saran dari konsumen data sangat diharapkan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga selesainya publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, April 2017

Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
K e p a l a,



Johanes De Britto Priyono, M.Sc

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| I. PENJELASAN UMUM | 1 |
| 1.1. Pendahuluan | 1 |
| 1.2. Ruang Lingkup..... | 1 |
| 1.3. Konsep dan Definisi | 2 |
| II. ULASAN RINGKAS | 7 |
| Tabel-Tabel | |
| 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015..... | 8 |
| 2. Persentasenya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015.... | 10 |
| 3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 | 11 |
| 4. Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016..... | 12 |
| 5. Dasar Perimbangan Keuangan dan Bagian Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004..... | 14 |
| 6. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015..... | 15 |
| 7. Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2015 | 16 |
| 8. Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016..... | 17 |
| 9. Jumlah dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 | 18 |

| | |
|--|----|
| 10. Persentase Belanja Tidak Langsung Terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011- 2016.... | 19 |
| 11. Jumlah dan Persentase Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 | 19 |
| 12. Persentase Realisasi Belanja Menurut Fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015..... | 20 |
| 13. Persentase Rencana Belanja Menurut Fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016..... | 21 |

Lampiran Tabel

| | |
|---|----|
| 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 (000 Rp)..... | 23 |
| 1.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 (000 Rp) | 24 |
| 1.3. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 (000Rp). | 25 |
| 1.4. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 (000 Rp). | 26 |
| 1.5. Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 (000 Rp) | 27 |
| 1.6. Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 (000 Rp). | 28 |
| 2.1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2015 (000 Rp). | 29 |
| 2.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2015 (000Rp) | 30 |
| 2.3. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2015 (000 Rp) | 31 |
| 2.4. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2016 (000 Rp)..... | 32 |
| 2.5. Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2016 (000 Rp). | 33 |
| 2.6. Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2016 (Persen). | 34 |
| 3.1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2015 (000 Rp) | 35 |

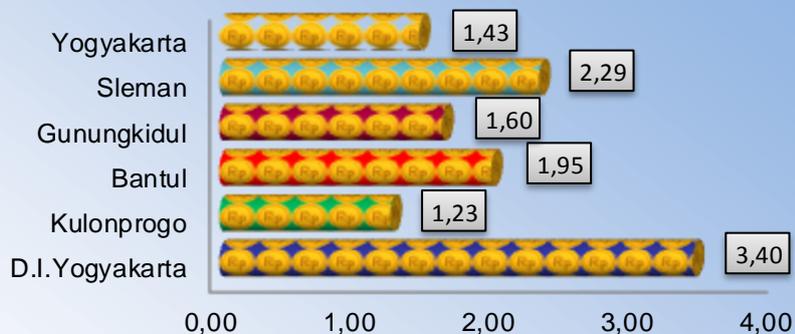
| | | |
|-----|---|----|
| 3.2 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2015 (000 Rp) | 36 |
| 3.3 | Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2015 (000 Rp) | 37 |
| 3.4 | Rencana Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2016 (000 Rp)..... | 38 |
| 3.5 | Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2016 (000 Rp)..... | 39 |
| 3.6 | Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2016 (000 Rp)..... | 40 |
| 4.1 | Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 (000 Rp) | 41 |
| 4.2 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 (000Rp) | 42 |
| 4.3 | Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 (000Rp) | 43 |
| 4.4 | Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 (000 Rp)..... | 44 |
| 4.5 | Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 (000 Rp)..... | 45 |
| 4.6 | Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 (000 Rp)..... | 46 |
| 5.1 | Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2015 (000 Rp)..... | 47 |
| 5.2 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016 (000Rp) | 48 |
| 5.3 | Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2015 (000 Rp).. | 49 |
| 5.4 | Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016 (000 Rp)..... | 50 |
| 5.5 | Reencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016 (000 Rp)..... | 51 |
| 5.6 | Reencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016 (000 Rp)..... | 52 |
| 6.1 | Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015 (000 Rp)..... | 51 |

| | |
|---|----|
| 6.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015 (000 Rp) | 54 |
| 6.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015 (000 Rp) | 55 |
| 6.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 (000 Rp). | 56 |
| 6.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 (000Rp) | 57 |
| 6.6 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 (000 Rp). | 58 |

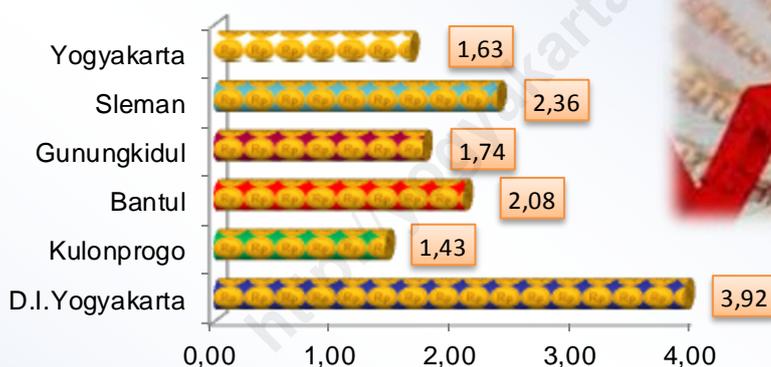
Gambar- Gambar

| | |
|---|----|
| 1. Komposisi Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Menurut Perolehan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 (Persen). | 11 |
| 2. Komposisi Realisasi Belanja Menurut Belanja Langsung dan Tidak Langsung di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 (Persen). | 18 |

Realisasi Pendapatan Daerah 2015 (Triliun Rupiah)



APBD 2016 (Triliun Rupiah)



APBD 2016 se-
Provinsi
D.I. Yogyakarta
mengalami kenaikan

I. PENJELASAN UMUM

I.1. Pendahuluan

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus diusahakan untuk lebih meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah terus berupaya untuk mendapatkan dan meningkatkan serta menggali sumber-sumber potensi daerah. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2013 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu data statistik mengenai keuangan daerah menjadi semakin diperlukan dalam rangka keperluan kelengkapan informasi tentang keuangan negara, analisis dan pengambilan keputusan. Kegunaan data keuangan daerah antara lain :

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi secara makro seperti pendapatan regional, tabel input output, dan neraca arus dana.
2. Memberikan informasi tentang realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi pemerintah pusat, untuk menentukan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah.

I.2. Ruang Lingkup

Pengumpulan data statistik keuangan daerah dibedakan antara lain :

1. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi.

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dikumpulkan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

I.3. Konsep dan Definisi

I.3.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.1. Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

1.2. Retribusi Daerah

Yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi dalam tiga bagian yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Contoh retribusi jasa umum antara lain pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, dan lain-lain. Contoh retribusi jasa usaha antara lain pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi usaha daerah, dan lain-lain. Contoh retribusi perizinan tertentu antara lain izin mendirikan bangunan, izin trayek, dan lain-lain.

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan lain-lain.

2. Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan ini terdiri dari Bagi

Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1. Bagi Hasil Pajak.

Bagi hasil pajak terdiri dari bagian penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain.

2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak.

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2.3. Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

2.4. Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.

-
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah penerimaan dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Penerimaan lainnya terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

I.3.2 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Tak Langsung

Belanja tak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Kelompok belanja tak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Belanja langsung meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Ulasan

Pendapatan pemerintah
D.I Yogyakarta pada
tahun 2015 sebesar
3,40 triliun naik menjadi
3.49 triliun



II. ULASAN RINGKAS

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian wewenang ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa, dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal.

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan memenuhi azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi semakin berkembang sejalan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Agar daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu memiliki sumber pembiayaan yang cukup. Wujud otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab menuntut pemerintah daerah agar dapat meningkatkan penerimaan dan mengoptimalisasikan pengeluaran.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Selanjutnya, berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan

daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data statistik keuangan daerah dapat memberikan gambaran perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran serta analisisnya yang merupakan informasi penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Dalam Tabel 1. dapat dilihat gambaran realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2015

| Pemerintah Daerah | Realisasi Pendapatan (Juta Rp.) | Realisasi Belanja (Juta Rp.) | Ratio Pendapatan terhadap Belanja | Surplus/Defisit (%) |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| D.I.Yogyakarta | 3 400 014,81 | 3 496 425,50 | 0,97 | -2,84 |
| Kab. Kulonprogo | 1 227 474,67 | 1 243 069,95 | 0,99 | -1,27 |
| Kab. Bantul | 1 951 223,24 | 1 933 302,50 | 1,01 | 0,92 |
| Kab. Gunungkidul | 1 599 006,00 | 1 586 001,08 | 1,01 | 0,81 |
| Kab. Sleman | 2 294 622,77 | 2 328 751,92 | 0,99 | -1,49 |
| Kota Yogyakarta | 1 434 009,59 | 1 539 699,34 | 0,93 | -7,37 |

Dari tabel tersebut dapat kita amati, bahwa rasio pendapatan/penerimaan daerah terhadap belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul lebih dari satu atau mengalami surplus anggaran. Hal ini berarti bahwa realisasi pendapatan yang diperoleh pada tahun 2015 sudah dapat mencukupi kebutuhan belanja daerah. Sedangkan rasio pendapatan/penerimaan daerah terhadap belanja yang dikeluarkan Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta kurang dari satu, berarti realisasi pendapatan yang diperoleh mengalami

defisit anggaran atau realisasi pendapatan yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan belanja daerah sehingga perlu penambahan pendapatan dari pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta pada tahun 2015 memperoleh pendapatan/penerimaan sebesar 3,40 triliun rupiah dengan total pembelanjaan mencapai besaran 3,50 triliun rupiah. Dengan demikian pada tahun 2015 Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta mengalami defisit keuangan sebesar 96,41 miliar rupiah.

Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memperoleh pendapatan/penerimaan keuangan terbesar diantara kabupaten/kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu mencapai nilai 2,29 triliun rupiah. Dengan belanja sebesar 2,33 triliun rupiah membuat kabupaten ini mengalami defisit anggaran sebesar 34,13 miliar rupiah pada tahun 2015.

Salah satu syarat yang diperlukan (*necessary condition*) untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah sebagaimana uraian sebelumnya, adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan pemerintah daerah tersebut telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu disamping sumber pembiayaan dari pemerintah di atasnya (berupa dana perimbangan) juga sumber pembiayaan dari dalam sendiri.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, adalah daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah. Pengelolaan PAD yang baik adalah pengelolaan PAD yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, seiring dengan perkembangan perekonomian dan tanpa mengurangi alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah yang dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah.

Jenis-jenis pajak yang dikelola Pemerintah Provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan jenis pajak yang dikelola pemerintah kabupaten/kota yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Besarnya persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besarnya sumbangan PAD daerah terhadap total pendapatan daerah. Sumbangan realisasi PAD Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta tahun 2015 mencapai 46,86 persen dari total pendapatan. Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, menunjukkan bahwa daerah mampu untuk mencukupi belanja daerah sendiri.

Tabel 2
Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2011 – 2015

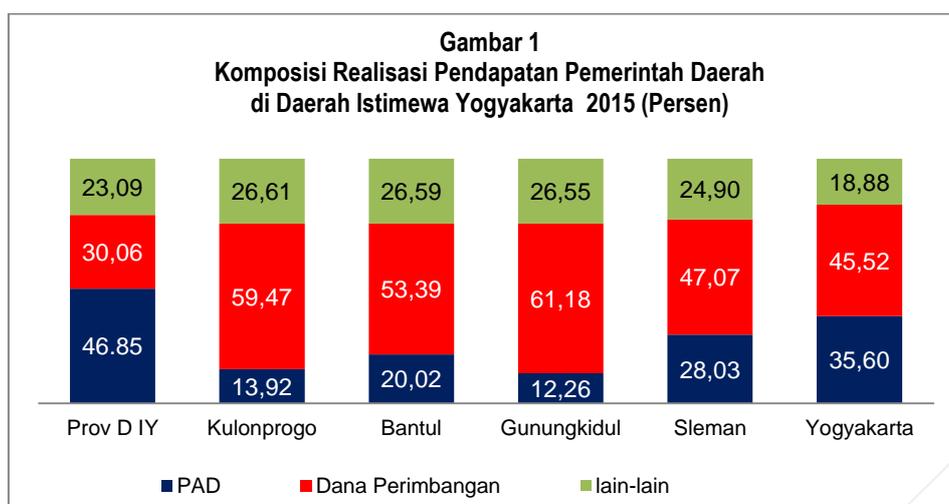
| Pemerintah Daerah | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| D.I.Yogyakarta | 54,02 | 46,23 | 38,87 | 46,65 | 46,86 |
| Kab. Kulonprogo | 6,79 | 8,39 | 9,57 | 14,16 | 13,92 |
| Kab. Bantul | 10,92 | 12,46 | 14,75 | 19,70 | 20,02 |
| Kab. Gunungkidul | 5,64 | 6,23 | 6,72 | 11,60 | 12,26 |
| Kab. Sleman | 17,29 | 18,94 | 23,65 | 27,61 | 28,03 |
| Kota Yogyakarta | 24,05 | 29,26 | 29,25 | 32,24 | 35,60 |

Sumbangan PAD Pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta dan pemerintah kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap total pendapatan ataupun terhadap total belanja tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2015

| Pemerintah Daerah | Realisasi Pendapatan (Juta Rp.) | Realisasi Belanja (Juta Rp.) | Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rp.) | PAD thd Pendapatan (%) | PAD thd Belanja (%) |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------|---|------------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| D.I. Yogyakarta | 3 400 014,81 | 3 496 425,50 | 1 593 110,77 | 46,86 | 45,56 |
| Kab. Kulonprogo | 1 227 474,67 | 1 243 069,95 | 170 822,33 | 13,92 | 13,74 |
| Kab. Bantul | 1 951 223,24 | 1 933 302,50 | 390 624,49 | 20,02 | 20,21 |
| Kab. Gunungkidul | 1 599 006,00 | 1 586 001,08 | 196 099,24 | 12,26 | 12,36 |
| Kab. Sleman | 2 294 622,77 | 2 328 751,92 | 643 130,08 | 28,03 | 27,62 |
| Kota Yogyakarta | 1 434 009,59 | 1 539 699,34 | 510 548,82 | 35,60 | 33,16 |

Besaran sumbangan PAD terhadap pendapatan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 cukup bervariasi. Dari lima kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta, Kota Yogyakarta merupakan kabupaten/kota yang mempunyai persentase PAD terbesar, yaitu mencapai 35,60 persen dari realisasi pendapatannya, disusul kemudian oleh Kabupaten Sleman dengan 28,03 persen. Kabupaten/kota dengan persentase PAD terhadap pendapatan yang terendah adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu 12,26 persen. Sementara itu persentase PAD Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta cukup besar yaitu mencapai 46,86 persen terhadap realisasi pendapatannya.



Dalam 5 tahun terakhir secara umum terlihat ada perubahan yang signifikan dari persentase PAD terhadap pendapatan daerahnya di semua realisasi anggaran pemerintahan daerah. Persentase PAD Kota Yogyakarta dalam lima tahun terakhir meningkat dari 24,05 persen pada tahun 2011 menjadi 35,60 persen pada tahun 2015. Demikian juga dengan Kabupaten Sleman meningkat dari 17,29 persen pada tahun 2011 menjadi 28,03 persen pada tahun 2015. Sementara itu tiga kabupaten lainnya persentase PAD nya juga meningkat dalam lima tahun terakhir ini. Sebaliknya Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta mengalami penurunan persentase PAD pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun 2011. Meskipun persentase PAD tahun ini yang mencapai 46,86 persen meningkat jika dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 46,65 persen.

Tabel 4
Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2016

| Pemerintah Daerah | Rencana Pendapatan (Juta Rp.) | Rencana Belanja (Juta Rp.) | Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rp.) | PAD thd Rencana Pendapatan (%) | PAD thd Rencana Belanja (%) |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| D.I. Yogyakarta | 3 921 068,62 | 4 189 992,20 | 1 553 180,37 | 39,61 | 37,07 |
| Kab. Kulonprogo | 1 428 564,82 | 1 477 684,84 | 172 434,611 | 12,07 | 11,67 |
| Kab. Bantul | 2 077 645,14 | 2 223 664,63 | 349 492,80 | 16,82 | 15,72 |
| Kab. Gunungkidul | 1 739 998,45 | 1 758 138,71 | 172 352,15 | 9,91 | 9,80 |
| Kab. Sleman | 2 356 293,84 | 2 498 770,23 | 614 410,60 | 26,08 | 24,59 |
| Kota Yogyakarta | 1 631 765,41 | 1 888 625,44 | 503 488,60 | 30,86 | 26,66 |

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berkelanjutan agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat). Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut, pada dasarnya dapat ditempuh melalui upaya

intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Namun dalam rangka ekstensifikasi khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi daerah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah selain dari PAD juga berasal dari Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, serta Lain-lain Penerimaan yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan bukan pajak. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil bukan pajak bersumber dari sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi). Dasar perolehan dana perimbangan dapat dilihat pada Tabel 5.

Sumber pendapatan lain yang sangat berperan sampai sekarang adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dua puluh enam persen (26 persen) dari penerimaan APBN (penerimaan dari minyak dan gas, penerimaan pajak serta penerimaan dari non-migas dan non-pajak) dialokasikan untuk DAU. Sepuluh persen (10 persen) DAU dibagi ke provinsi, dan sembilan puluh persen (90 persen) dibagi ke kabupaten/kota.

Tabel 5
Dasar Perimbangan Keuangan dan Bagian Daerah menurut
Undang-undang nomor 33 Tahun 2004

| Jenis Pungutan | Pemerintah (%) | Provinsi Bersangkutan (%) | Kabupaten /kota Penghasil (%) | Kabupaten /Kota Lain dan Provinsi Bersangkutan (%) |
|--|----------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. PBB ¹⁾ | 10,0 | 16,2 | 64,8 | 0,0 |
| 2. BPHTB | 20,0 | 16,0 | 64,0 | 0,0 |
| 3. PPh pasal 25, pasal 29 dan PPh pasal 21 | 80,0 | 8,0 | 12,0 | 0,0 |
| 4. Kehutanan | | | | |
| a. IHPH/IHH | 20,0 | 16,0 | 64,0 | 0,0 |
| b. Provisi Sumber Daya Hutan | 20,0 | 16,0 | 32,0 | 32,0 |
| c. Reboisasi | 60,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 5. Pertambangan Umum | | | | |
| a. Land-Rent (Iuran Tetap) | 20,0 | 16,0 | 64,0 | 0,0 |
| b. Royalty iuran Eksplorasi | 20,0 | 16,0 | 32,0 | 32,0 |
| 6. Perikanan ²⁾ | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Minyak Bumi | 84,5 | 3,1 | 6,2 | 6,2 |
| 8. Gas Bumi | 69,5 | 6,1 | 12,2 | 12,2 |
| 9. Panas Bumi | 20,0 | 16,0 | 32,0 | 32,0 |

Catatan :

¹⁾ 9 % untuk biaya pemungutan

²⁾ 80% untuk seluruh kabupaten/kota

Alokasi DAU tergantung dari bobot (tolok ukur) daerah. Penentuan Tolok Ukur (Bobot) didasarkan pada kebutuhan wilayah otonomi daerah paling sedikit dapat dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin, yang selanjutnya berkembang menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu juga didasarkan pada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap

daerah lain. Potensi ekonomi daerah yang antara lain dapat dicerminkan dari potensi penerimaan yang diterima daerah seperti potensi industri, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menjadi tolok ukur penentuan DAU.

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Pada dasarnya, dengan diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan ketergantungan daerah pada pusat tentang keuangan daerah diharapkan semakin kecil (sumbangan DAU kecil), atau dengan kata lain sumber pendapatan daerah bisa bersumber pada daerah sendiri (sumbangan PAD besar).

Tabel 6
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) serta Persentasenya terhadap
Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2015

| Pemerintah Daerah | Realisasi Pendapatan (Juta Rp.) | Realisasi Belanja (Juta Rp.) | Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rp.) | DAU thd Pendapatan (%) | DAU thd Belanja (%) |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------|--|------------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| D.I. Yogyakarta | 3 400 014,81 | 3 496 425,50 | 920 544,72 | 27,07 | 26,33 |
| Kab. Kulonprogo | 1 227 474,67 | 1 243 069,95 | 657 260,49 | 53,55 | 52,87 |
| Kab. Bantul | 1 951 223,24 | 1 933 302,50 | 942 850,83 | 48,32 | 48,77 |
| Kab. Gunungkidul | 1 599 006,00 | 1 586 001,08 | 872 566,96 | 54,57 | 55,02 |
| Kab. Sleman | 2 294 622,77 | 2 328 751,92 | 984 410,61 | 42,90 | 42,27 |
| Kota Yogyakarta | 1 434 009,59 | 1 539 699,34 | 622 365,35 | 43,40 | 40,42 |

Pada tahun 2015 besarnya DAU yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta sebesar 920,54 miliar rupiah atau mencapai 27,07 persen dari pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Besaran ini mampu mencukupi 26,33 persen dari belanja Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta pada tahun 2015.

Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta yang memiliki persentase DAU terhadap realisasi pendapatannya terendah adalah Kabupaten Sleman dengan 42,90 persen, diikuti Kota Yogyakarta sebesar 43,40 persen. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul memiliki persentase DAU terhadap realisasi pendapatannya tertinggi yaitu mencapai 54,57 persen.

Tabel 7
Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2011 - 2015

| Pemerintah Daerah | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| D.I. Yogyakarta | 38,69 | 34,86 | 29,31 | 28,66 | 27,07 |
| Kab. Kulonprogo | 56,08 | 60,18 | 59,31 | 57,07 | 53,55 |
| Kab. Bantul | 52,95 | 57,42 | 56,23 | 52,33 | 48,32 |
| Kab. Gunungkidul | 59,22 | 63,91 | 62,72 | 61,72 | 54,57 |
| Kab. Sleman | 48,19 | 50,05 | 46,94 | 45,84 | 42,90 |
| Kota Yogyakarta | 45,83 | 46,32 | 45,60 | 42,39 | 43,40 |

Realisasi DAU lima tahun terakhir peranannya terus menurun terhadap pendapatan daerah. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, terlihat ada penurunan peranan DAU yang signifikan di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015, sedangkan pemerintah kabupaten/kota sempat naik pada tahun 2012. Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta relatif mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

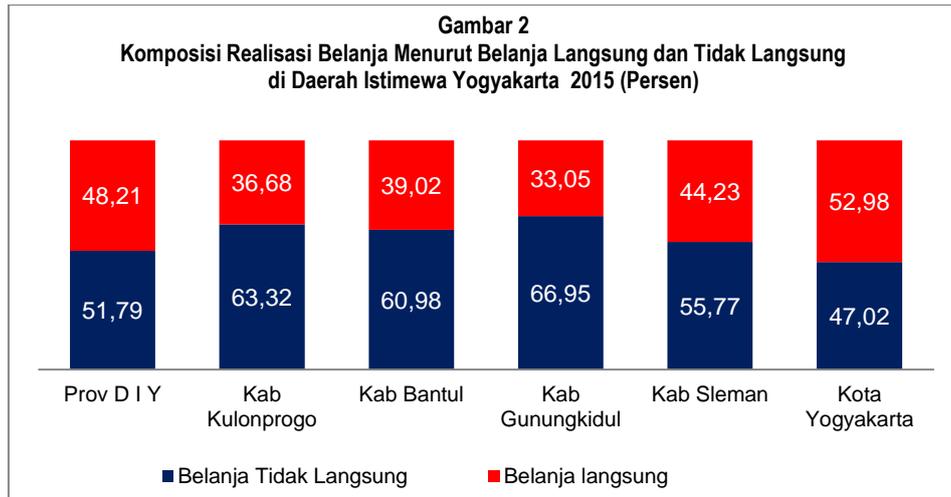
Adapun persentase DAU terhadap rencana anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se- D.I.Yogyakarta tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8
Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2016

| Pemerintah Daerah | Rencana Pendapatan (Juta Rp.) | Rencana Belanja (Juta Rp.) | Rencana Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rp.) | DAU thd Rencana Pendapatan (%) | DAU thd Rencana Belanja (%) |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| D.I. Yogyakarta | 3 921 068,62 | 4 189 992,20 | 940 835,43 | 23,99 | 22,45 |
| Kab. Kulonprogo | 1 428 564,82 | 1 477 684,84 | 718 490,51 | 50,29 | 48,62 |
| Kab. Bantul | 2 077 645,14 | 2 223 664,63 | 999 814,37 | 48,12 | 44,96 |
| Kab. Gunungkidul | 1 739 998,45 | 1 758 138,71 | 954 997,37 | 54,88 | 54,32 |
| Kab. Sleman | 2 356 293,84 | 2 498 770,23 | 1 014 310,63 | 43,05 | 40,59 |
| Kota Yogyakarta | 1 631 765,41 | 1 888 625,44 | 670 278,83 | 41,08 | 35,49 |

Dalam format lama, belanja daerah dibedakan menjadi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah mulai tahun 2007 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahannya selama tahun 2015 menghabiskan dana 1,81 triliun rupiah (51,79 persen dari total belanja) untuk belanja tidak langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Secara umum persentase pos pembelanjaan daerah pemerintah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta tahun 2015 sebagian besar masih digunakan untuk pos Belanja Tidak Langsung.



Kota Yogyakarta mempunyai proporsi belanja tidak langsung yang paling rendah diantara kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 47,02 persen, diikuti Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul masing-masing sebesar 55,77 persen dan 60,98 persen. Sebaliknya daerah yang memiliki proporsi belanja tidak langsung terbesar adalah Kabupaten Gunungkidul dengan 66,95 persen terhadap realisasi belanja daerahnya.

Tabel 9
Jumlah dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2015

| Pemerintah Daerah | Belanja Tidak Langsung (Juta Rp.) | Persentase terhadap Total Belanja Tidak Langsung | Belanja Langsung (Juta Rp.) | Persentase terhadap Total Belanja Langsung |
|-------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| D.I.Yogyakarta | 1 810 940,13 | 51,79 | 1 685 485,38 | 48,21 |
| Kab. Kulonprogo | 787 062,65 | 63,32 | 456 007,31 | 36,68 |
| Kab. Bantul | 1 178 889,70 | 60,98 | 754 412,81 | 39,02 |
| Kab. Gunungkidul | 1 061 767,45 | 66,95 | 524 233,63 | 33,05 |
| Kab. Sleman | 1 298 797,52 | 55,77 | 1 029 954,41 | 44,23 |
| Kota Yogyakarta | 724 041,32 | 47,02 | 815 658,02 | 52,98 |

Tabel 10
Persentase Belanja Tidak Langsung Terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2011 - 2015

| Pemerintah Daerah | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| D.I.Yogyakarta | 61,54 | 60,33 | 57,40 | 52,34 | 53,26 |
| Kab. Kulonprogo | 69,20 | 67,08 | 67,94 | 65,44 | 64,12 |
| Kab. Bantul | 70,94 | 69,06 | 66,02 | 57,55 | 60,42 |
| Kab. Gunungkidul | 73,18 | 70,91 | 69,44 | 69,02 | 66,40 |
| Kab. Sleman | 69,11 | 70,00 | 62,60 | 57,73 | 56,60 |
| Kota Yogyakarta | 65,24 | 59,57 | 51,37 | 49,52 | 50,49 |

Jika kita cermati persentase belanja tidak langsung dalam lima tahun terakhir, terlihat bahwa pemerintah kabupaten Kulonprogo dan pemerintah Sleman mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. Untuk tahun 2015 persentase belanja tidak langsung yang mengalami kenaikan persentase pada belanja tidak langsung, yaitu pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 53,26 persen, diikuti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul masing-masing sebesar 50,49 persen dan 60,42 persen.

Tabel 11
Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2016

| Pemerintah Daerah | Rencana Belanja Tidak Langsung (Juta Rp.) | Persentase thd Total Rencana Belanja Tidak Langsung | Rencana Belanja Langsung (Juta Rp.) | Persentase thd Total Rencana Belanja Langsung |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| D.I.Yogyakarta | 2 070 516,32 | 49,43 | 2 119 075,88 | 50,57 |
| Kab. Kulonprogo | 922 921,96 | 62,46 | 554 762,88 | 37,54 |
| Kab. Bantul | 1 360 241,96 | 61,17 | 863 422,68 | 38,83 |
| Kab. Gunungkidul | 1 211 228,19 | 68,89 | 546 910,52 | 31,11 |
| Kab. Sleman | 1 424 237,05 | 57,00 | 1 074 533,18 | 43,00 |
| Kota Yogyakarta | 854 702,98 | 45,26 | 1 033 922,46 | 54,74 |

Adapun persentase belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap rencana anggaran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-D.I.Yogyakarta tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 11.

Dilihat dari realisasi belanja menurut fungsi belanjanya, Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta paling banyak membelanjakan anggarannya di sektor pendidikan. yaitu pemerintah kabupaten Kulonprogo, kabupaten Bantul, kabupaten Gunungkidul dan kota Yogyakarta. Hal ini bisa terlihat dari persentase belanja di sektor pendidikan yang paling tinggi dibanding sektor lainnya.

Tabel 12
Persentase Realisasi Belanja Menurut Fungsinya
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2015

| Fungsi Belanja | Provinsi DIY | Kab Kulon progo | Kab Bantul | Kab Gunung kidul | Kab Sleman | Kota Yogya- karta |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Pelayanan Umum | 48,16 | 19,50 | 20,03 | 22,57 | 27,86 | 23,33 |
| 2. Ketertiban dan Keamanan | 1,08 | 0,87 | 0,90 | 0,79 | 1,63 | 0,03 |
| 3. Ekonomi | 10,48 | 6,56 | 4,91 | 6,84 | 11,46 | 5,64 |
| 4. Lingkungan Hidup | 0,46 | 0,37 | 1,04 | 1,87 | 2,12 | 2,85 |
| 5. Perumahan dan Fasilitas Umum | 12,55 | 12,91 | 11,50 | 8,74 | 17,67 | 13,85 |
| 6. Kesehatan | 4,82 | 18,18 | 18,23 | 12,19 | 28,68 | 15,33 |
| 7. Pariwisata dan Budaya | 10,48 | 0,38 | 0,71 | 0,83 | 0,77 | 0,88 |
| 8. Pendidikan | 9,60 | 40,74 | 41,97 | 45,28 | 8,65 | 36,45 |
| 9. Perlindungan Sosial | 2,37 | 0,49 | 0,70 | 0,88 | 1,17 | 1,64 |
| Jumlah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sedangkan Kabupaten Sleman pada tahun 2015 membelanjakan anggaran terbesarnya pada sektor kesehatan, yaitu mencapai 28,68 persen terhadap total belanjanya, sedikit di atas sektor pelayanan umum yang sebesar 27,86 persen.

Sementara Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta banyak membelanjakan anggarannya di sektor pelayanan umum, yaitu mencapai 48,16 persen dari total belanja. Sektor lain dengan persentase besar antara lain sektor perumahan/fasilitas umum sebesar 12,55 persen, diikuti sektor ekonomi dan sektor pariwisata dan budaya masing-masing sebesar 10,48 persen.

Rencana prioritas belanja pada tahun anggaran 2016 tidak banyak berubah dibanding realisasi belanja tahun 2015. Hal ini terlihat dari besarnya persentase masing-masing sektor belanja yang tidak jauh berbeda dibanding realisasi anggaran tahun sebelumnya. Pada rencana anggaran pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, sektor pendidikan, pelayanan umum, kesehatan dan sektor perumahan dan fasilitas umum masih mendapatkan porsi belanja yang lebih besar dibanding sektor lainnya. Sedangkan pada Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta porsi belanja yang paling besar masih pada sektor pelayanan umum, diikuti sektor ekonomi dan lingkungan hidup.

Tabel 13
Persentase Rencana Belanja Menurut Fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta 2016

| Fungsi Belanja | Provinsi DIY | Kab Kulon progo | Kab Bantul | Kab Gunung kidul | Kab Sleman | Kota Yogya- karta |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Pelayanan Umum | 53,42 | 22,52 | 22,84 | 24,86 | 19,72 | 26,02 |
| 2. Ketertiban dan Keamanan | 0,68 | 0,57 | 1,05 | 0,66 | 1,46 | 0,03 |
| 3. Ekonomi | 9,94 | 6,16 | 5,51 | 5,78 | 14,84 | 5,91 |
| 4. Lingkungan Hidup | 9,32 | 0,28 | 0,93 | 1,52 | 2,46 | 2,97 |
| 5. Perumahan dan Fasilitas Umum | 8,39 | 13,02 | 10,11 | 7,11 | 23,76 | 12,66 |
| 6. Kesehatan | 5,37 | 18,68 | 18,08 | 13,08 | 26,21 | 15,40 |
| 7. Pariwisata dan Budaya | 4,76 | 0,42 | 0,81 | 1,00 | 1,30 | 1,14 |
| 8. Pendidikan | 6,54 | 37,85 | 40,00 | 44,90 | 9,20 | 34,30 |
| 9. Perlindungan Sosial | 1,57 | 0,50 | 0,67 | 1,11 | 1,05 | 1,57 |
| Jumlah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

LAMPIRAN TABEL



Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2015 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Daerah | 3 400 014 812 | 100,00 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 1 593 110 770 | 46,85 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 1 021 886 268 | 30,06 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 785 017 774 | 23,09 |
| II | Belanja Daerah | 3 496 425 502 | 100,00 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 1 810 940 127 | 51,79 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 1 685 485 375 | 48,21 |
| | Surplus | (96 410 690) | |
| | Pembiayaan Netto | 461 093 118 | |

**Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
(000 Rp)**

| No | Rincian | Nilai | % |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Asli Daerah | 1 593 110 770 | 46,86 |
| 1.1 | Pajak Daerah | 1 397 772 210 | 41,11 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 45 811 954 | 1,35 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 52 502 632 | 1,54 |
| 1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 97 023 974 | 2,85 |
| II | Dana Perimbangan | 1 021 886 268 | 30,06 |
| 2.1 | Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | 62 257 506 | 1,83 |
| 2.2 | Dana Alokasi Umum | 920 544 722 | 27,07 |
| 2.3 | Dana Alokasi Khusus | 39 084 040 | 1,15 |
| III | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 785 017 774 | 23,09 |
| Jumlah Pendapatan Daerah | | 3 400 014 812 | 100,00 |

Tabel 1.3 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2015 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Belanja Tidak Langsung | 1 810 940 127 | 51,79 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 540 817 462 | 15,47 |
| 1.2 | Belanja Bunga | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Belanja Subsidi | 0 | 0,00 |
| 1.4 | Belanja Hibah | 562 260 179 | 16,08 |
| 1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 7 073 500 | 0,20 |
| 1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 583 092 613 | 16,68 |
| 1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 117 696 373 | 3,37 |
| 1.8 | Belanja Tidak Terduga | 0 | 0,00 |
| II | Belanja Langsung | 1 685 485 375 | 48,21 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 128 727 296 | 3,68 |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 929 155 893 | 26,57 |
| 2.3 | Belanja Modal | 627 602 186 | 17,95 |
| Jumlah Belanja Daerah | | 3 496 425 502 | 100,00 |

Tabel 1.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Daerah | 3 921 068 617 | 100,00 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 1 553 180 369 | 39,61 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 1 768 771 681 | 45,11 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 599 116 567 | 15,28 |
| II | Belanja Daerah | 4 189 992 196 | 100,00 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 2 070 916 317 | 49,43 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 2 119 075 879 | 50,57 |
| | Surplus | (268 923 579) | |
| | Pembiayaan Netto | 268 923 579 | |

Tabel 1.5 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Asli Daerah | 1 553 180 369 | 39,61 |
| 1.1 | Pajak Daerah | 1 377 156 183 | 35,12 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 36 998 728 | 0,94 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 57 398 373 | 1,46 |
| 1.4 | Lain –lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 81 627 085 | 2,08 |
| II | Dana Perimbangan | 1 768 771 681 | 45,11 |
| 2.1 | Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | 108 902 297 | 2,78 |
| 2.2 | Dana Alokasi Umum | 940 835 434 | 23,99 |
| 2.3 | Dana Alokasi Khusus | 719 033 950 | 18,34 |
| III | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 599 116 567 | 15,28 |
| Jumlah Pendapatan Daerah | | 3 921 068 617 | 100,00 |

Tabel 1.6 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Belanja Tidak Langsung | 2 070 916 317 | 49,43 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 632 402 209 | 15,09 |
| 1.2 | Belanja Bunga | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Belanja Subsidi | 0 | 0,00 |
| 1.4 | Belanja Hibah | 768 176 098 | 18,33 |
| 1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 4 683 000 | 0,11 |
| 1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 561 340 599 | 13,40 |
| 1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 91 814 411 | 2,19 |
| 1.8 | Belanja Tidak Terduga | 12 500 000 | 0,30 |
| II | Belanja Langsung | 2 119 075 879 | 50,57 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 150 710 364 | 3,60 |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1 020 959 720 | 24,37 |
| 2.3 | Belanja Modal | 947 405 795 | 22,61 |
| Jumlah Belanja Daerah | | 4 189 992 196 | 100,00 |

Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo 2015 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Daerah | 1 227 474 673 | 100,00 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 170 822 327 | 13,92 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 729 998 680 | 59,47 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 326 653 666 | 26,61 |
| II | Belanja Daerah | 1 243 069 953 | 100,00 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 787 062 647 | 63,32 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 456 007 306 | 36,68 |
| | Surplus | (15 595 280) | |
| | Pembiayaan Netto | 130 616 265 | |

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo 2015 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Asli Daerah | 170 822 327 | 13,92 |
| 1.1 | Pajak Daerah | 25 526 940 | 2,08 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 6 965 714 | 0,57 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10 534 501 | 0,86 |
| 1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 127 795 172 | 10,41 |
| II | Dana Perimbangan | 729 998 680 | 59,47 |
| 2.1 | Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | 18 931 791 | 1,54 |
| 2.2 | Dana Alokasi Umum | 657 260 489 | 53,55 |
| 2.3 | Dana Alokasi Khusus | 53 806 400 | 4,38 |
| III | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 326 653 666 | 26,61 |
| Jumlah Pendapatan Daerah | | 1 227 474 673 | 100,00 |

Tabel 2.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo 2015 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Belanja Tidak Langsung | 787 062 647 | 63,32 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 670 441 246 | 53,93 |
| 1.2 | Belanja Bunga | 8 143 | 0,00 |
| 1.3 | Belanja Subsidi | 0 | 0,00 |
| 1.4 | Belanja Hibah | 8 395 564 | 0,68 |
| 1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 7 496 390 | 0,60 |
| 1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 3 003 743 | 0,24 |
| 1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 97 520 579 | 7,85 |
| 1.8 | Belanja Tidak Terduga | 196 982 | 0,02 |
| II | Belanja Langsung | 456 007 306 | 36,68 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 42 306 319 | 3,40 |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 187 645 273 | 15,10 |
| 2.3 | Belanja Modal | 226 055 714 | 18,19 |
| Jumlah Belanja Daerah | | 1 243 069 953 | 100,00 |

Tabel 2.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo 2016 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Daerah | 1 428 564 823 | 100,00 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 172 434 611 | 12,07 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 1 062 502 098 | 74,38 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 193 628 114 | 13,55 |
| II | Belanja Daerah | 1 477 684 839 | 100,00 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 922 921 962 | 62,46 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 554 762 877 | 37,54 |
| | Surplus | (49 120 016) | |
| | Pembiayaan Netto | 49120 016 | |

Tabel 2.5 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo 2016 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Asli Daerah | 172 434 611 | 12,07 |
| 1.1 | Pajak Daerah | 37 289 400 | 2,61 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 10.248.939 | 0,72 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13 035 452 | 0,91 |
| 1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | 111 860 820 | 7,83 |
| II | Dana Perimbangan | 1 062 502 098 | 74,38 |
| 2.1 | Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | 26 100 709 | 1,83 |
| 2.2 | Dana Alokasi Umum | 718 490 508 | 50,29 |
| 2.3 | Dana Alokasi Khusus | 317 910 881 | 22,25 |
| III | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 193 628 114 | 13,55 |
| Jumlah Pendapatan Daerah | | 1 428 564 823 | 100,00 |

**Tabel 2.6 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo 2016
(000 Rp)**

| No | Rincian | Nilai | % |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Belanja Tidak Langsung | 922 921 962 | 62,46 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 747 948 741 | 50,62 |
| 1.2 | Belanja Bunga | 3 187 500 | 0,22 |
| 1.3 | Belanja Subsidi | 0 | 0,00 |
| 1.4 | Belanja Hibah | 24 248 499 | 1,64 |
| 1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 4 652 260 | 0,31 |
| 1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 4 444 281 | 0,30 |
| 1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 136 440 681 | 9,23 |
| 1.8 | Belanja Tidak Terduga | 2 000 000 | 0,14 |
| II | Belanja Langsung | 554 762 877 | 37,54 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 35 856 942 | 2,43 |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 211 316 640 | 14,30 |
| 2.3 | Belanja Modal | 307 589 295 | 20,82 |
| Jumlah Belanja Daerah | | 1 477 684 839 | 100,00 |

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2015 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Daerah | 1 951 223 237 | 100,00 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 390 624 492 | 20,02 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 1 041 842 461 | 53,39 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 518 756 284 | 26,59 |
| II | Belanja Daerah | 1 933 302 495 | 100,00 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 1 178 889 690 | 60,98 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 754 412 805 | 39,02 |
| | Surplus | 17 920 742 | |
| | Pembiayaan Netto | 265 105 310 | |

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2015 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Asli Daerah | 390 624 492 | 20,02 |
| 1.1 | Pajak Daerah | 123 257 184 | 6,32 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 22 840 343 | 1,17 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 18 379 740 | 0,94 |
| 1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah | 226 147 225 | 11,59 |
| II | Dana Perimbangan | 1 041 842 461 | 53,39 |
| 2.1 | Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | 26 631 974 | 1,36 |
| 2.2 | Dana Alokasi Umum | 942 850 827 | 48,32 |
| 2.3 | Dana Alokasi Khusus | 72 359 660 | 3,71 |
| III | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 518 756 284 | 26,59 |
| Jumlah Pendapatan Daerah | | 1 951 223 237 | 100,00 |

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2015 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Belanja Tidak Langsung | 1 178 889 690 | 60,98 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 968 253 480 | 50,08 |
| 1.2 | Belanja Bunga | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Belanja Subsidi | 0 | 0,00 |
| 1.4 | Belanja Hibah | 43 433 692 | 2,25 |
| 1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 17 453 300 | 0,90 |
| 1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 11 177 423 | 0,58 |
| 1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 137 955 724 | 7,14 |
| 1.8 | Belanja Tidak Terduga | 616 071 | 0,03 |
| II | Belanja Langsung | 754 412 805 | 39,02 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 48 401 697 | 2,50 |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 371 130 713 | 19,20 |
| 2.3 | Belanja Modal | 334 880 395 | 17,32 |
| Jumlah Belanja Daerah | | 1 933 302 495 | 100,00 |

Tabel 3.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2016 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Daerah | 2 077 645 142 | 100,00 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 349 492 790 | 16,82 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 1 152 588 359 | 55,48 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 575 563 993 | 27,70 |
| II | Belanja Daerah | 2 223 664 634 | 100,00 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 1 360 241 955 | 61,17 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 863 422 679 | 38,83 |
| | Surplus | (146 019 492) | |
| | Pembiayaan Netto | 146 049 492 | |

Tabel 3.5 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2016 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Asli Daerah | 349 492 790 | 16,82 |
| 1.1 | Pajak Daerah | 104 668 270 | 5,04 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 21 918 542 | 1,05 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 19 314 676 | 0,93 |
| 1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 203 591 302 | 9,80 |
| II | Dana Perimbangan | 1 152 588 359 | 55,48 |
| 2.1 | Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | 33 336 934 | 1,60 |
| 2.2 | Dana Alokasi Umum | 999 814 365 | 48,12 |
| 2.3 | Dana Alokasi Khusus | 119 437 060 | 5,75 |
| III | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 575 563 993 | 27,70 |
| Jumlah Pendapatan Daerah | | 2 077 645 142 | 100,00 |

**Tabel 3.6 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2016
(000 Rp)**

| No | Rincian | Nilai | % |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Belanja Tidak Langsung | 1 360 241 955 | 61,17 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 1 117 661 233 | 50,26 |
| 1.2 | Belanja Bunga | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Belanja Subsidi | 0 | 0,00 |
| 1.4 | Belanja Hibah | 13 035 930 | 0,59 |
| 1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 5 508 550 | 0,25 |
| 1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 12 664 759 | 0,57 |
| 1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 195 731 577 | 8,80 |
| 1.8 | Belanja Tidak Terduga | 15 639 906 | 0,70 |
| II | Belanja Langsung | 863 422 679 | 38,83 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 55 856 376 | 2,51 |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 468 612 655 | 21,07 |
| 2.3 | Belanja Modal | 338 953 648 | 15,24 |
| Jumlah Belanja Daerah | | 2 223 664 634 | 100,00 |

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2015 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Daerah | 1 599 005 995 | 100,00 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 196 099 244 | 12,26 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 978 310 012 | 61,18 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 424 596 739 | 26,55 |
| II | Belanja Daerah | 1 586 001 084 | 100,00 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 1 061 767 454 | 66,95 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 524 233 630 | 33,05 |
| | Surplus | 13 004 911 | |
| | Pembiayaan Netto | 213 795 164 | |

**Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2015
(000 Rp)**

| No | Rincian | Nilai | % |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Asli Daerah | 196 099 244 | 1,26 |
| 1.1 | Pajak Daerah | 36 178 236 | 2,26 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 28 059 628 | 1,75 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10 584 694 | 0,66 |
| 1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 121 276 686 | 7,58 |
| II | Dana Perimbangan | 978 310 012 | 61,18 |
| 2.1 | Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | 20 771 681 | 1,30 |
| 2.2 | Dana Alokasi Umum | 872 566 961 | 54,57 |
| 2.3 | Dana Alokasi Khusus | 84 971 370 | 5,31 |
| III | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 424 596 739 | 26,55 |
| Jumlah Pendapatan Daerah | | 1 599 005 995 | 100,00 |

Tabel 4.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2015 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Belanja Tidak Langsung | 1 061 767 454 | 66,95 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 867 829 590 | 54,72 |
| 1.2 | Belanja Bunga | 10 318 | 0,00 |
| 1.3 | Belanja Subsidi | 0 | 0,00 |
| 1.4 | Belanja Hibah | 25 931 107 | 1,63 |
| 1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 7 116 800 | 0,45 |
| 1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 7 950 846 | 0,50 |
| 1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 152 803 341 | 9,63 |
| 1.8 | Belanja Tidak Terduga | 125 452 | 0,01 |
| II | Belanja Langsung | 524 233 630 | 33,05 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 40 151 223 | 2,53 |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 245 907 373 | 15,50 |
| 2.3 | Belanja Modal | 238 175 034 | 15,02 |
| Jumlah Belanja Daerah | | 1 586 001 084 | 100,00 |

Tabel 4.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2016 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Daerah | 1 739 998 449 | 100,00 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 172 352 154 | 9,91 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 1 371 136 459 | 78,80 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 196 509 836 | 11,29 |
| II | Belanja Daerah | 1 758 138 712 | 100,00 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 1 211 228 191 | 68,89 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 546 910 521 | 31,11 |
| | Surplus | (18 140 263) | |
| | Pembiayaan Netto | 18 140 263 | |

Tabel 4.5 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2016 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Asli Daerah | 172 352 154 | 9,91 |
| 1.1 | Pajak Daerah | 32 852 300 | 1,89 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 28 712 666 | 1,65 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10 291 070 | 0,59 |
| 1.4 | Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 100 496 118 | 5,78 |
| II | Dana Perimbangan | 1 371 136 459 | 78,80 |
| 2.1 | Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | 27 517 205 | 1,58 |
| 2.2 | Dana Alokasi Umum | 954 997 369 | 54,88 |
| 2.3 | Dana Alokasi Khusus | 388 621 885 | 22,33 |
| III | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 196 509 836 | 11,29 |
| Jumlah Pendapatan Daerah | | 1 739 998 449 | 100,00 |

**Tabel 4.6 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2016
(000 Rp)**

| No | Rincian | Nilai | % |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Belanja Tidak Langsung | 1 211 228 191 | 68,89 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 996 260 055 | 56,67 |
| 1.2 | Belanja Bunga | 18 580 | 0,00 |
| 1.3 | Belanja Subsidi | 0 | 0,00 |
| 1.4 | Belanja Hibah | 729 500 | 0,04 |
| 1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 7 650 030 | 0,44 |
| 1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 203 665 865 | 11,58 |
| 1.8 | Belanja Tidak Terduga | 2 904 161 | 0,17 |
| II | Belanja Langsung | 546 910 521 | 31,11 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 31 247 065 | 1,78 |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 255 464 895 | 14,53 |
| 2.3 | Belanja Modal | 260 198 561 | 14,80 |
| Jumlah Belanja Daerah | | 1 758 138 712 | 100,00 |

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2015 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Daerah | 2 294 622 765 | 100,00 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 643 130 080 | 28,03 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 1 080 162 445 | 47,07 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 571 330 240 | 24,90 |
| II | Belanja Daerah | 2 328 751 920 | 100,00 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 1 298 797 515 | 55,77 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 1 029 954 405 | 44,23 |
| | Surplus | (34 129 155) | |
| | Pembiayaan Netto | 512 650 787 | |

**Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2015
(000 Rp)**

| No | Rincian | Nilai | % |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Asli Daerah | 643 130 080 | 28,03 |
| 1.1 | Pajak Daerah | 373 137 768 | 16,26 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 45 086 332 | 1,96 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 34 330 599 | 1,50 |
| 1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | 190 575 381 | 8,31 |
| II | Dana Perimbangan | 1 080 162 445 | 47,07 |
| 2.1 | Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | 38 281 937 | 1,67 |
| 2.2 | Dana Alokasi Umum | 984 410 612 | 42,90 |
| 2.3 | Dana Alokasi Khusus | 29 421 080 | 1,28 |
| 2.4 | Alokasi Dana Desa dari APBN | 28 048 816 | 1,22 |
| III | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 571 330 240 | 24,90 |
| Jumlah Pendapatan Daerah | | 2 294 622 765 | 100,00 |

Tabel 5.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2015 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Belanja Tidak Langsung | 1 298 797 515 | 55,77 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 1 033 804 730 | 44,39 |
| 1.2 | Belanja Bunga | 258 765 | 0,01 |
| 1.3 | Belanja Subsidi | 0 | 0,00 |
| 1.4 | Belanja Hibah | 50 913 755 | 2,19 |
| 1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 38 703 752 | 1,66 |
| 1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 41 101 803 | 1,76 |
| 1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 133 725 021 | 5,74 |
| 1.8 | Belanja Tidak Terduga | 289 689 | 0,01 |
| II | Belanja Langsung | 1 029 954 405 | 44,23 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 163 717 705 | 7,03 |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 439 453 873 | 18,87 |
| 2.3 | Belanja Modal | 426 782 827 | 18,33 |
| Jumlah Belanja Daerah | | 2 328 751 920 | 100,00 |

Tabel 5.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2016 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Daerah | 2 356 293 841 | 100,00 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 614 410 593 | 26,08 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 1 519 169 465 | 64,47 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 222 713 783 | 9,45 |
| II | Belanja Daerah | 2 498 770 229 | 100,00 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 1 424 237 049 | 57,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 1 074 533 180 | 43,00 |
| | Surplus | (142 476 388) | |
| | Pembiayaan Netto | 142 476 388 | |

Tabel 5.5 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2016 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Asli Daerah | 614 410 593 | 26,08 |
| 1.1 | Pajak Daerah | 367 200 000 | 15,58 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 42 383 974 | 1,80 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 36 647 000 | 1,56 |
| 1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 168 179 619 | 7,14 |
| II | Dana Perimbangan | 1 519 169 465 | 64,47 |
| 2.1 | Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | 61 833 117 | 2,62 |
| 2.2 | Dana Alokasi Umum | 1 014 310 630 | 43,05 |
| 2.3 | Dana Alokasi Khusus | 380 011 001 | 16,13 |
| III | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 63 014 717 | 2,67 |
| Jumlah Pendapatan Daerah | | 2 356 293 841 | 100,00 |

**Tabel 5.6 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2016
(000 Rp)**

| No | Rincian | Nilai | % |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Belanja Tidak Langsung | 1 424 237 049 | 56,60 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 1 127 683 121 | 45,13 |
| 1.2 | Belanja Bunga | 4 106 424 | 0,16 |
| 1.3 | Belanja Subsidi | 0 | 0,00 |
| 1.4 | Belanja Hibah | 43 620 364 | 1,75 |
| 1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 29 939 899 | 1,20 |
| 1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 41 128 397 | 1,65 |
| 1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 172 681 974 | 6,91 |
| 1.8 | Belanja Tidak Terduga | 5 076 870 | 0,20 |
| II | Belanja Langsung | 1 074 533 180 | 43,00 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 163 421 284 | 6,54 |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 562 908 883 | 22,53 |
| 2.3 | Belanja Modal | 348 203 013 | 13,93 |
| Jumlah Belanja Daerah | | 2 498 770 229 | 100,00 |

Tabel 6.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2015
(000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Daerah | 1 434 009 588 | 100,00 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 510 548 823 | 35,60 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 652 748 113 | 45,52 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 270 712 652 | 18,88 |
| II | Belanja Daerah | 1 539 699 344 | 100,00 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 724 041 324 | 47,02 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 815 658 020 | 52,98 |
| | Surplus | (105 689 756) | |
| | Pembiayaan Netto | 311 031 926 | |

Tabel 6.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2015 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Asli Daerah | 510 548 823 | 35,60 |
| 1.1 | Pajak Daerah | 304 068 623 | 21,20 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 40 057 651 | 2,79 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 12 938 168 | 0,90 |
| 1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 153 484 381 | 10,70 |
| II | Dana Perimbangan | 652 748 113 | 45,52 |
| 2.1 | Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | 28 040 062 | 1,96 |
| 2.2 | Dana Alokasi Umum | 622 365 351 | 43,40 |
| 2.3 | Dana Alokasi Khusus | 2 342 700 | 0,16 |
| III | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 270 712 652 | 18,88 |
| Jumlah Pendapatan Daerah | | 1 434 009 588 | 100,00 |

Tabel 6.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2015 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Belanja Tidak Langsung | 724 041 324 | 47,02 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 669 675 279 | 43,49 |
| 1.2 | Belanja Bunga | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Belanja Subsidi | 0 | 0,00 |
| 1.4 | Belanja Hibah | 47 372 263 | 3,08 |
| 1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 4 534 392 | 0,29 |
| 1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 0 | 0,00 |
| 1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 2 434 210 | 0,16 |
| 1.8 | Belanja Tidak Terduga | 25 180 | 0,00 |
| II | Belanja Langsung | 815 658 020 | 52,98 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 143 505 508 | 9,32 |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 415 757 355 | 27,00 |
| 2.3 | Belanja Modal | 256 395 157 | 16,65 |
| Jumlah Belanja Daerah | | 1 539 699 344 | 100,00 |

Tabel 6.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2016 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Daerah | 1 631 765 405 | 100,00 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 503 488 602 | 30,86 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 967 286 299 | 59,28 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 160 990 504 | 9,87 |
| II | Belanja Daerah | 1 888 625 440 | 100,00 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 854 702 977 | 45,26 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 1 033 922 463 | 54,74 |
| | Surplus | (256 860 035) | |
| | Pembiayaan Netto | 142 476 388 | |

**Tabel 6.5 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta 2016
(000 Rp)**

| No | Rincian | Nilai | % |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Pendapatan Asli Daerah | 503 488 602 | 30,86 |
| 1.1 | Pajak Daerah | 314 421 000 | 19,27 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 38 200 198 | 2,34 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 14 989 732 | 0,92 |
| 1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 135 877 672 | 8,33 |
| II | Dana Perimbangan | 967 286 299 | 59,28 |
| 2.1 | Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | 55 713 758 | 3,41 |
| 2.2 | Dana Alokasi Umum | 670 278 830 | 41,08 |
| 2.3 | Dana Alokasi Khusus | 241 293 711 | 14,79 |
| III | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 160 990 504 | 9,87 |
| Jumlah Pendapatan Daerah | | 1 631 765 405 | 100,00 |

Tabel 6.6 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2016 (000 Rp)

| No | Rincian | Nilai | % |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Belanja Tidak Langsung | 854 702 977 | 45,26 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 789 259 218 | 41,79 |
| 1.2 | Belanja Bunga | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Belanja Subsidi | 0 | 0,00 |
| 1.4 | Belanja Hibah | 57 235 161 | 3,03 |
| 1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 2 147 935 | 0,11 |
| 1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 0 | 0,00 |
| 1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 3 060 663 | 0,16 |
| 1.8 | Belanja Tidak Terduga | 3 000 000 | 0,16 |
| II | Belanja Langsung | 1 033 922 463 | 54,74 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 172 283 509 | 9,12 |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 548 283 190 | 29,03 |
| 2.3 | Belanja Modal | 313 355 764 | 16,59 |
| Jumlah Belanja Daerah | | 1 888 625 440 | 100,00 |

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://yogyakarta.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183
Telp. (0274) 4342234, Fax. (0274) 4342230

E-mail: bps3400@bps.go.id Homepage: <http://yogyakarta.bps.go.id>

ISBN : 978-602-139-246-1



978-602-139-246-1